

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan keanekaragaman yang beragam ditandai dengan perbedaan suku bangsa atau etnis, budaya, bahasa, dan keyakinan agama¹ yang disebut dengan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok yakni: kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Untuk kelompok mayoritas itu sendiri biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memang berasal dari Indonesia atau warga asli yang memang sudah secara turun-temurun tinggal di Indonesia dan untuk kelompok minoritas adalah kelompok-kelompok pendatang yang tujuan awalnya hanyalah berdagang, akan tetapi lama-kelamaan mereka tinggal dan menetap di Negara Indonesia, seperti etnis Tionghoa, etnis Arab, India dan masih banyak yang lainnya.²

Salah satu etnis yang telah lama tinggal adalah etnis Tionghoa ,menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bermigran jauh sebelum masuknya bangsa Eropa masuk ke Nusantara hal tersebut dibuktikan oleh salah satu catatan yang dibuat oleh Ma Huan merupakan penerjemah dalam ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke berbagai Lautan Selatan, termasuk Pulau Jawa pada abad ke-15.³

Populasi penduduknya pun lebih besar jika dibanding dengan Eropa dan Arab yang tersebar hampir seluruh nusantara. Namun sebenarnya di Indonesia sendiri

¹ Laylatul Fitrya (2013). *Tionghoa Dalam Diskrimansi Orde Baru Tahun 1967-2000*. Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Volume 1 : 02.

² Leo Suryadinata(1999) *Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Wacana Vol. 1, No. 2, Oktober

³ Hari Poerwanto. *Cina Khek di Singkawang* (Depok : Komunitas Bambu, 2004) hlm, 47

merupakan sebuah negara yang mempunyai masalah Tionghoa begitu kompleks yang terkait dengan identifikasi diri mereka terhadap negara tempat mereka bermukim. Meskipun etnis Tionghoa telah meninggalkan identitasnya dan mengidentifikasi diri menjadi bagian dari golongan bangsa Indonesia, mereka tetap dianggap sebagai bukan bangsa asli.⁴

Hal tersebut mempengaruhi tindakan yang dilakukan pemerintah dan masyarakatnya menimbulkan dampak tragis. Salah satunya terkait dengan identifikasi diri adalah 'diskriminasi' yang mulai terlihat ketika Kolonial Hindia Belanda memasuki Indonesia.

Berawal dari ketakutan terhadap keharmonisan etnis Tionghoa dengan pribumi yang membahayakan mereka, oleh sebab itu Belanda menerapkan strategi untuk memisahkan kedua golongan ini dengan membagi-bagi golongan yang pertama yaitu golongan Eropa khususnya Belanda, kedua golongan Timur Asing (Arab dan Cina), dan terakhir adalah pribumi.

Pribumi sendiri dalam konsepnya adalah penduduk warga negara Indonesia asli/setempat⁵, selain itu Belanda juga mengeluarkan berbagai kebijakan lain sebagai bentuk propaganda memecah belah Tionghoa dan Pribumi seperti mengeklusifkan tempat tinggal mereka dan memberi orang-orang Tionghoa hak-hak untuk memungut pajak, menjual candu, dan membuka rumah judi yang sangat merugikan penduduk setempat.⁶

Adanya propaganda Belanda tersebut menjadi akar permasalahan antara

⁴ *Ibid.* Hlm.1.

⁵ Lusiana Andriani Lubis(2012). *Komunikasi AntarBudaya Etnis Tionghoa dan Pribumi di Kota Medan* . Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 10 :1

⁶ Levia Chessiagi, Wawan Darmawan, Tarunasena(2018). *Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Etnis Tionghoa Dalam Bingkai Kebijakan Asimilasi Orde Baru tahun 1966-1998*. Faktum, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, Vol 7 : 1.

Pribumi dan etnis Tionghoa yang berkelanjutan dalam periode-periode berikutnya, sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa masih terjadi di kalangan pribumi. Memasuki kemerdekaan tepatnya periode Orde lama dikenal dengan masa diskriminasinya sangat rasialis, terlihat dari kepemimpinan Sukarno yang dikenal sebagai nasionalis Indonesia radikal dan sangat memperjuangkan pribumi.

Konsep pemikiran mengenai nasionalis Sukarno, menghasilkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1959 yang menetapkan semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa tidak diberi izin setelah tanggal 31 Desember 1959, sebagai akibat dari PP tersebut selama tahun 1960-1961 tercatat lebih dari 100.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia.

Jatuhnya rezim Orde Lama tidak mampu menghilangkan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang anti-imperialisme dan revolusi, rezim Orde Baru sangat berfokus dalam bidang perekonomian dan antikomunis akibat dari peristiwa G30S 1965.⁷

Sejak berkuasa tahun 1966, pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa etnis Tionghoa bermasalah karena mereka berasal dari luar wilayah geografis nasional Indonesia, berbeda budayanya, kuat secara ekonomi namun dicurigai terkait erat dengan komunisme.

Hadirnya pandangan seperti itu tidak lepas dari penilaian bahwa status WNI mereka hanya digunakan untuk mencari sektor perdagangan serta keberhasilan ekonomi. Selain itu, secara umum dapat dikatakan bahwa ketika Indonesia memasuki era pembangunan pada zaman Orde Baru yang relatif berhasil, berdampak terhadap diskriminasi sebagai bentuk kekhawatiran negara terhadap sesuatu yang berbahaya bagi pencapaian dua tujuan besar pemerintahan yaitu stabilitas politik serta

⁷ Alfian Hamzah. *Kapak Jadi NonPri; Warga Tionghoa Mencari Keadilan* (Bandung;Zaman,1998) hlm,50.

pembangunan nasional.⁸

Akibat kekhawatiran pemerintah tersebut, menghasilkan produk hukum yang paling menyeluruh untuk tujuannya menyelesaikan masalah terkait dengan etnis Tionghoa. Namun dalam praktiknya, mempersulit keadaan etnis Tionghoa. Di awal tahun 1967, Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang modal asing hendaknya digunakan semaksimal mungkin untuk mempercepat laju pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu dipergunakan dalam bidang-bidang dan sektor di mana investasi modal Indonesia tidak atau belum dapat tersedia dalam waktu singkat.⁹

Hal ini berdampak modal Tionghoa dari luar Indonesia dianggap sebagai modal asing, selain itu pada tanggal 6esember tahun 1967 dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama kepercayaan, dan adat istiadat Cina yang menyatakan *bahwa” agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina di Indonesia yang berpusat pada negeri dan leluhurnya, yang dalam manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psikologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur dan ditempatkan pada proporsi yang wajar”*.¹⁰

Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat oleh Soeharto dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian masalah Tionghoa agar cepat selesai. Tetapi dalam beberapa contoh penerapan-nya, cenderung anti asimilasi seperti toleransi terhadap agama-agama minoritas dan perbedaan antara pribumi dan non pribumi, cenderung malah memilah dan bukan mempersatukan etnis Tionghoa dengan orang Indonesia asli . Tentu hal itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka yang tertekan

⁸ Nurcholish Madjid, dkk. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia : Pergulatan Mencari Jati Diri* (Depok : Kepik, 2012) hlm ,174.

⁹ *Ibid*, hlm 177

¹⁰ Melly G. Tan. *Etnis Tionghoa di Indonesia : Kumpulan Tulisan* (Jakarta ; Yayasan Obor, 2008) hlm ,274

dengan kebijakan yang membatasi kebebasan hidup.¹¹

Kondisi tersebut terus berjalan hingga datang bulan Mei 1998 yang dikenal sebagai bulan penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu terjadi kerusuhan anti Tionghoa, Meskipun hal tersebut bukan sesuatu yang baru dalam sejarah, tetapi peristiwa Mei 1998 dianggap sangat mengejutkan, karena kekejaman dan sasaran, dibuat bukan hanya harta benda orang Tionghoa yang menjadi sasaran, tetapi juga nyawa.¹²

Namun demikian kerusuhan tersebut berhasil menumbangkan rezim Orde Baru Soeharto dan Indonesia masuk dalam era Reformasi, dalam pasca-Soeharto ini, telah banyak terbit berbagai kebijakan yang menandakan adanya pengakuan, menjamin keterwakilan dan mengangkomodir praktis partisipasi, toleransi dan merayakan keberagaman etnisitas dan komunitas sebagai sesama warga negara di Nusantara.¹³

Bedasarkan pemaparan mengenai Kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia, penulis tertarik untuk membahas lebih kompleks lagi mengenai kehidupan etnis Tionghoa dalam satu wilayah yaitu kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor saat Orde Baru. Kecamatan ini dikenal sebagai daerah yang cukup banyak etnis keturunan Tionghoa, yang bermukim dari tahun 1891. Mereka adalah orang-orang keturunan Cina Benteng di Tangerang, pengertian dari keturunan, menurut kbbi adalah anak cucu; generasi; angkatan:

Banyaknya etnis Tionghoa ini dikarenakan adanya kawin silang dengan penduduk setempat. Kecamatan ini memiliki tiga wilayah yang terdapat banyak etnis Tionghoa yaitu Kelurahan Sasak Panjang, Tonjong, Kampung Cina Perum Inpokod.

¹¹ Benny G. Setiono. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta; Elkasa, 2002) hlm, 1029.

¹² Leo Suryadinata. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Jakarta; LP3ES, 2005) hlm, 120.

¹³ Irine Hiraswari Gayatri. *Tionghoa dan Ke-Indonesia-an: Komunitas Tionghoa di Semarang dan Medan* (Jakarta; Buku Obor, 2019) hlm, 1.

Kehidupan etnis Tionghoa sendiri di daerah Tajur Halang saat rezim Orde Baru sangat memprihatinkan dan tidak jauh berbeda dengan kehidupan etnis Tionghoa di wilayah lainnya. Wilayah mereka menjadi sangat terpencil karena dilarangnya acara-acara kebudayaan, serta upacara keagamaan, menjadikan budaya penduduk etnis Tionghoa di Tajur Halang kurang dikenal oleh masyarakat kota.

Namun wilayah tersebut menjadi tempat persinggahan sementara etnis Tionghoa yang berada di Jakarta, dan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat saat kerusuhan Mei 1998 terjadi. Pentingnya topik ini adalah untuk menjelaskan pengaruh kebijakan kehidupan Etnis Tionghoa di Tajur Halang dalam bingkai kebijakan ekonomi, sosial dan budaya pada masa Orde Baru.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Setelah dianalisisnya sumber data yang digunakan untuk melakukan pengamatan, maka pembatasan masalah secara temporal yaitu tahun 1967-1998 serta batasan spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Tajur Halang Kabupaten Bogor.

Pokok permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sebelum masa Orde Baru?
2. Bagaimana latar belakang dari terciptanya Kebijakan Asimilasi terhadap etnis Tionghoa?
3. Bagaimana pelaksanaan dan pengaruh dari Kebijakan Asimilasi etnis Tionghoa terhadap kehidupan sosial budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat Tionghoa di Tajur Halang selama tahun 1967-1998?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum menginformasikan untuk mengetahui kehidupan

etnis Tionghoa di Tajur Halang dalam bentuk kebijakan. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang pengaruh dari Kebijakan Asimilasi terhadap kehidupan sosial budaya, pendidikan, ekonomi selama tahun 1967-1998.

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai alternatif baru dalam menambahkan kekayaan penulisan yang bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati sejarah.
- 2) Menarik masyarakat luas dan pendidik untuk berkunjung ke wilayah Tajur Halang di Kabupaten Bogor

D. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah yang melalui empat tahapan yakni *Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi*.¹⁴

1) Heuristik

Sebelum mengumpulkan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat(dimana) atau siapa(sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya.¹⁵ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan sebagai cara mendapatkan sumber adalah “Studi Pustaka, Dokumen dan Wawancara. Studi Pustaka dilakukan di berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional, Ruang Baca Sejarah, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Indonesia serta tempat-tempat lain sebagai pendukung yang menyimpan beberapa koleksi buku mengenai kebijakan Orde Baru. Dokumen

¹⁴ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah* (Jakarta : UI Press, 1983) hlm 23-24.

¹⁵ *Ibid.*h. 26

yang terdapat di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Indonesia berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa serta wawancara langsung dengan narasumber yaitu penduduk Tajur Halang sebagai pelaku sejarah, selain itu, terdapat penelitian sebelumnya yaitu Nur Aini “ *Interaksi Masyarakat Pendatang dengan Masyarakat Pribumi dalam Membangun Toleransi Beragama di Desa Tonjong, Bogor*”. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta Tahun 2009, namun hal yang membedakan oleh penelitian yang ditulis oleh penulis adalah perihal tujuan penulis serta batasan temporal, penulis membahas terkait dengan pengaruh dari Kebijakan Asimilasi pada tahun 1967-1998.

2) Kritik Sumber Sejarah

Tahap yang dilakukan setelah pengumpulan sumber sudah lengkap yaitu Kritik sumber sejarah sebagai, upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik bisa dilakukan baik secara *internal (dalam)* ataupun *eksternal (luar)*.

Kritik internal yang dimaksud adalah kritik mengacu pada kredibilitas sumber, apakah isi dokumen ini dapat dipercaya, tidak dimanipulasi, mengandus bias, dikecohkan, dan lain-lain. Kritik ini ditunjukkan untuk memahami isi teks selain itu *kritik eksternal* merupakan usaha untuk mendapatkan otentisitas sumber dengan melakukan penelitian fisik seperti materi sumber, dokumen, atau arsip-arsip yang kemudian diuji bagaimanajenis, ukuran, bahan, kualitas, dan lain-lain.¹⁶Beberapa sumber primer seperti arsip-arsip terdapat di perpustakaan besar yaitu Perpustakaan Nasional serta wawancara terhadap narasumber yang menjadi pelaku sejarah dianggap

¹⁶ *Ibid.* h.27

penulis sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya.

3) Interpretasi (analisis, sintesis)

Interpretasi atau penafsiran merupakan bagian yang cukup penting, karena lewat interpretasi dapat memperoleh atau menafsirkan sesuatu. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengeinterpretasikan kembali hubungan antara fakta dari sumber-sumber sejarah yang diperoleh, karena tanpa hal tersebut tidak akan berguna atau tidak dapat berbicara tanpa penafsiran dari peneliti sendiri.¹⁷

4) Historiografi

Historiografi merupakan puncak dari segalanya dalam metode penelitian sejarah, Sejarawan pada fase ini mencoba menangkap dan memahami sejarah sebagaimana terjadinya.¹⁸Jadi, tahap ini merupakan tahapan yang mencakup semua cara penulisan, pemaparan, serta pelaporan hasil sejarah yang dilakukan.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini ke dalam beberapa bab untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari dasar pemikiran, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan sumber sejarah, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

Bab kedua akan membahas tentang gambaran etnis Tionghoa di Indonesia yang meliputi kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa sebelum masa Orde Baru.

¹⁷ *Ibid.*h.28

¹⁸ *Ibid.*h.30

Bab ketiga akan membahas latar belakang serta pengaruh dari Kebijakan Asimilasi terhadap kehidupan sosial budaya, pendidikan, ekonomi dari masyarakat Tionghoa di Tajur Halang selama tahun 1967-1998.

Bab terakhir, bab keempat berisi kesimpulan. Bab ini merupakan rangkaian hasil akhir, yaitu jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan dalam rumusan penelitian.



